

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Ukuran pemerintah daerah berimplikasi pada kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan aset yang berpengaruh pada kinerja keuangan.
2. Pendapatan asli daerah juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah, sehingga berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Teori keagenan menekankan perlunya pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola pendapatan ini secara akuntabel demi kepentingan prinsipal.
3. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, ketergantungan dana ini dapat berimplikasi pada pengelolaan sumber daya dan motivasi pemerintah daerah. Dalam kerangka teori keagenan, pengelolaan dana pusat ini membutuhkan pengawasan agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab agen.

4. Secara simultan, ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Interaksi ini mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah, di mana transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat maupun peningkatan kinerja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Periode penelitian hanya mencakup tahun 2020–2023 sehingga belum mampu menggambarkan kondisi kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas rentang waktu penelitian agar dapat menunjukkan tren dan perubahan kinerja keuangan daerah secara lebih menyeluruh serta memperkuat validitas hasil penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Variabel independen yang digunakan hanya meliputi ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan. Padahal terdapat variabel lain seperti belanja modal, tingkat ketergantungan fiskal, dan kemakmuran daerah yang juga dapat memengaruhi kinerja keuangan. Peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel-variabel tersebut agar hasil

penelitian lebih komprehensif dan dapat menggambarkan faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

3. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio efisiensi, sehingga hasilnya belum memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan beberapa indikator kinerja seperti rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan keuangan untuk memperoleh hasil yang lebih holistik mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara nasional. Disarankan agar penelitian berikutnya memperluas objek penelitian hingga mencakup beberapa provinsi di Indonesia, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara lebih representatif.
5. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aset daerah, termasuk aset produktif maupun aset yang belum berdaya guna, melalui peningkatan kualitas manajemen aset, digitalisasi data aset, dan penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.
6. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dengan cara memperluas basis pajak dan retribusi, menerapkan sistem pemungutan berbasis digital, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah seperti sektor pariwisata, UMKM, dan industri kreatif.

7. Pemerintah daerah perlu mengelola dana perimbangan secara lebih efektif dan berorientasi pada program prioritas, sambil tetap mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
8. Pemerintah daerah perlu menerapkan perencanaan keuangan terintegrasi antara pengelolaan aset, optimalisasi PAD, dan pemanfaatan dana perimbangan, sehingga seluruh komponen fiskal dapat saling mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah. Transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa ketiga variabel tersebut mampu bekerja secara sinergis dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.